



Merokok Harus di Kuburan

■ Fokus Kembangkan Kampung Ramah Anak

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya menghadirkan ruang publik yang ramah anak. Hal tersebut dikarenakan persentase penduduk Yogya yang masih anak-anak mencapai hampir 30 persen dari jumlah total penduduk Yogya atau 113.206 jiwa.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa sudah banyak kampung yang mendeklarasikan diri guna menopang kepentingan anak-anak, khususnya dalam hal bermain dan belajar.

"Mulai dari Kampung Ramah Anak, Kampung Jam Belajar Masyarakat, dan Kampung Bebas Asap Rokok. Untuk Kampung Jam Belajar Masyarakat setiap pukul 18.00-21.00 memantapkan tivi untuk memberikan kesempatan anak-anak belajar," ujarnya dalam workshop Tim Evaluasi Kota Layak Anak, di Hotel Gaia Cosmo, Sabtu (5/5).

Selanjutnya, Heru menu-



Kalau di Terban tempat merokoknya di kuburan. Itu inisiatif masyarakat sendiri untuk menunjukkan bahwa di sana kampung ramah anak

turkan bahwa untuk Kampung Bebas Asap Rokok saat ini sudah dideklarasikan di 139 titik. Kampung tersebut pada dasarnya melarang para perokok untuk merokok di sembarang tempat.

"Kalau di Terban tempat merokoknya di kuburan. Itu inisiatif masyarakat sendiri

untuk menunjukkan bahwa di sana kampung ramah anak," bebernya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Octo Noor Arafat menjelaskan, pembangunan Kelurahan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak berawal dari inisiasi masyarakat.

"Mereka mengusulkan lalu meminta pendampingan dari kami. Tahun kemarin kami sudah menyusun kurikulum Kampung Ramah Anak. Bisa jadi pedoman kampung lain yang ingin menjadi Kampung Ramah Anak," urai Octo.

Ia menambahkan bahwa sempat ada kesulitan terkait pengembangan Kampung Ramah Anak. Awalnya mereka menggunakan dana hibah. Namun setelah dana hibah tidak ada, mereka diarahkan untuk memanfaatkan anggaran di kelurahan dan kecamatan. "Termasuk anggaran stimulan RW (rukun warga) bisa digunakan

untuk pembiayaan kegiatan Kampung Ramah Anak," ujarnya.

Octo menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan di Kampung Ramah Anak. Namun berbagai lembaga, dunia usaha, forum anak, dan media massa juga terlibat dalam pemenuhan hak anak di Kota Yogyakarta.

KIA

Sementara itu, selain akta kelahiran anak, orangtua juga didorong untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa hal yang coba dilakukan untuk mendorong orangtua untuk segera memproses KIA adalah dengan memberikan beberapa penawaran.

"KIA diupayakan memiliki manfaat ganda. Jadi nantinya anak bisa masuk objek wisata di DIY dengan diskon khusus. Selain itu juga diskon untuk toko buku dan juga toko obat. Itu diharapkan mampu mendorong percepatan yang belum punya KIA," bebernya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005